WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Volume. 1 No. 4 November 2023
e-ISSN: 3032-2413; dan p-ISSN :3032-5293, Hal. 14-22
DOI: https://doi.org/10.62383/wissen.v2i4.552
Available Online at: https://journal.appisi.or.id/index.php/WISSEN

Tantangan dalam Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat

Sari Zaman Wulandari [1*], Raudhatul Jannah [2], M. Thfeil Arabbi [3], Yulia Hanoselina [4]
[1-4] Universitas Negeri Padang , Indonesia

*Korespendensi penulis: sarizamanwulandari@gmail.com**

Abstract: *The placement of Civil Servants (ASN) in the Mentawai Islands Regency, West Sumatra Province, faces significant challenges, such as difficult transportation access, limited communication networks, and budget constraints for improving ASN competency. This study aims to analyze these challenges and their impact on public services in remote areas. The research method used is a literature review, gathering data from various related sources. The findings show that ASN in the Mentawai Islands often face long and costly journeys to attend training due to limited sea transportation. Inadequate communication networks hinder the ASN's duties and efforts to improve education quality. Budget limitations for training and competency development also pose challenges, negatively affecting discipline and the quality of public services. The remoteness of the area and its vulnerability to disasters are additional concerns for ASN, and the lack of infrastructure hampers their activities. Therefore, better management strategies for ASN in remote areas are needed to enhance the effectiveness of public services and support the development of policies that are more responsive to the needs of the local community.*

Keywords*: Civil Servants, Mentawai Islands, Placement, Challenges.*

Abstrak, Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, menghadapi tantangan signifikan, seperti akses transportasi sulit, terbatasnya jaringan komunikasi, dan kendala anggaran dalam peningkatan kompetensi ASN. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan-tantangan tersebut serta dampaknya terhadap pelayanan publik di daerah terpencil. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pengumpulan data dari berbagai sumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASN di Kepulauan Mentawai sering menghadapi perjalanan panjang dan mahal untuk mengikuti pelatihan, dengan akses transportasi laut yang terbatas. Jaringan komunikasi yang tidak memadai menghambat tugas ASN dan peningkatan kualitas pendidikan. Keterbatasan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN juga menjadi kendala, yang berdampak negatif terhadap disiplin dan kualitas layanan publik. Daerah yang terpencil dan rawan bencana juga menjadi kekhawatiran bagi ASN, serta minimnya sarana prasarana menghambat aktivitas ASN. Diperlukan strategi yang lebih baik dalam manajemen ASN di daerah terpencil untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan mendukung pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Kata Kunci : Aparatur Sipil Negara, Kepulauan Mentawai, Penempatan, tantangan.

1. PENDAHULUAN

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian keja yang di angkat oleh pejabat pembinan kepegawaian dan disertahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau lainnya. Aparatur sipil Negara sebagai tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi (Widjaja, 2016). Aparatur Sipil Negara (ASN) juga sebagai orang yang harus dikerjakan dalam bidang tertentu dan harus di tempatkan pada suatu daerah. Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah-daerah tertentu merupakan strategi penting dalam pemerintahan untuk memastikan

Received Oktober 23, 2024; Revised Oktober 08, 2024; Accepted November 22, 2024; Online Available November 30, 2024

bahwa pelayanan publik dapat berjalan dengan efektif dan merata. Di Indonesia, proses ini melibatkan penugasan ASN ke berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah yang terpencil salah satunya daerah Kepulauan Mentawai di Provinsi Sumatera Barat.

Penempatan adalah proses dalam manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan penugasan atau pengalokasian individu ke posisi atau jabatan tertentu dalam suatu organisasi. Tujuan utama penempatan adalah memastikan bahwa karyawan ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keterampilan, pengalaman, dan kualifikasi mereka agar dapat menjalankan tugas dengan efektif dan efisien. Menurut B. Siswanto Sastrohadiwiryo (2005), penempatan tenaga kerja adalah proses pemberian tugas dan pekerjaan kepada tenaga kerja yang lulus seleksi untuk dilaksanakan sesuai ruang lingkup yang telah ditetapkan, serta mampu mempertanggungjawabkan segala risiko dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi atas tugas dan pekerjaan, wewenang, serta tanggung jawabannya.

Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. UU ini mengatur prinsip- prinsip dasar dalam manajemen ASN, termasukpenempatan pegawai, pengembangan karir, dan kesejahteraan. Pasal 20 UU ASN yang terbaru menegaskan bahwa penempatan ASN harus memperhatikan kebutuhan organisasi, kompetensi, serta potensi pegawai untuk memastikan bahwa pelayanan publik dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Dalam penempatan ASN di daerah, UU Nomor 20 Tahun 2023 menggaris bawahi pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar penempatan ASN di tingkat daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik lokal dan potensi daerah masing-masing. Selain itu, UU ini mengamanatkan bahwa penempatan ASN harus didasarkan pada prinsip merit, di mana keputusan penempatan harus mempertimbangkan kualifikasi dan kinerja pegawai untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintahan daerah dengan optimal.

Penempatan ASN di daerah-daerah terpencil di Sumatra Barat seperti Kepulauan Mentawai memerlukan juga koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa semua aspek administratif dan logistik dapat diatasi dengan baik. Kepulauan Mentawai merupakan kepulauan yang terletak di barat Sumatra, dan merupakan gugusan pulau yang terdiri dari empat pulau utama yaitu Siberut, Sipora, serta Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan. Pulau-pulau ini membentang sepanjang sekitar 400 km dari utara ke selatan di Samudra Hindia, dan terpisah dari daratan utama Sumatra oleh Selat Mentawai. Pulau Siberut adalah yang terbesar di antara pulau-pulau tersebut, diikuti oleh

Sipora yang terletak di utara, dan Pulau Pagai Utara serta Pagai Selatan di selatan. Kepulauan Mentawai merupakan wilayah yang rawan akan terjadi bencana dan kk relatif terpencil. Keterpencilan ini disebabkan oleh lokasinya yang jauh dari daratan utama Sumatra, dengan akses utama hanya melalui kapal atau perahu dari pantai barat. Kerawanan bencana di Kepulauan Mentawai terutama dipengaruhi oleh aktivitas seismik di zona subduksi Lempeng Indo-Australia dan Lempeng.

Tabel 1. Jumlah ASN di Kepulauan Mentawai Tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	324
2	Perempuan	1.551
Total		2.875

Sumber : Data Badan Statistik Kepulauan Mentawai

Penempatan Aparatur Sipil Negara di Kepulauan Mentawai merupakan hal yang menjadi perhatian, kerena secara geografi kepulauan ini merupakan daerah yang rentann bencana, aksesibilitas yang terbatas, dan infrastruktur yang belum memadai sering kali menjadi kendala signifikan. Secara geografis, Kepulauan Mentawai terletak di lepas pantai barat Sumatra dan terkenal dengan karakteristik geografisnya yang berbeda dari wilayah daratan utama. Pulau-pulau yang tersebar, aksesibilitas yang terbatas, serta infrastruktur yang belum memadai seringkali menjadi kendala dan tatangan signifikan. ASN yang ditempatkan di daerah ini harus siap menghadapi perjalanan yang sulit dan jauh, termasuk untuk mengikuti pelatihan yang seringkali dilakukan di luar pulau. Tantangan ini membuat sebagian ASN enggan untuk ditempatkan di Kepulauan Mentawai, yang juga dikenal sebagai daerah yang rentan terhadap bencana alam.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan-tantangan utama yang dihadapi dalam penempatan ASN di Kepualauan Mentawai. Dengan pemahaman mengenai masalah-masalah tersebut, diharapkan akan ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi penempatakan ASN didaerah. Temun dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih baik dalam mengelola sumber daya manusia di daerah daerah terpencil di Indonesia khusunya daerah terpencil.

2. METODE

Metode penelitian adalah pendekatan terstruktur dan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian yang akan di buat alam sebuah karya ilmiah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi keperpustakaan atau library research. Menurut Mardalis (1999) kajian keperpustakaann merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, artikel, jurnal, majalah da lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang akan di pecahkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan pengumpulan data dan informasi melalui pembacaan literatur atau sumber-sumber tertulis berkaitan dengan penelitian. Pada proses ini, peneliti mengumpulkan berbagai referensi yang terkait dengan tantangan dalam penempatan ASN dengan mempelajari berbagai sumber bacaan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (contann analysis). Menurut Afifuddin dan Saebani (2009) teknik analisisi isi (content analysis) merupakan teknik yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suat informasi tertulis atau tercetak lalu menyimpulkan data-data yag dikumpulkan dan dianalisis tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penempatan Aparaur Sipil Negara (ASN) dikepulauan Mentawai menghadapi beberapa tantangan, diantaranya yaitu :

Akses dan Biaya Transportasi

Akses transportasi di Kepulauan Mentawai menjadi salah satu tantangan utama bagi ASN, seperti yang dialami oleh oleh ASN Madrasah di Kepulauwan Mentawai. Perjalanan yang memakan waktu hingga 168 jam untuk mengikuti pelatihan ke Batam menggambarkan kompleksitas dan kesulitan mobilitas di daerah terpencil ini. ASN di Mentawai sangat bergantung pada transportasi laut, yang sering kali tidak memiliki jadwal yang tetap dan dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang ekstrem. Hal ini menyebabkan perjalanan menjadi tidak terprediksi, sehingga ASN sering kali menghadapi keterlambatan yang signifikan saat hendak berangkat dinas atau mengikuti pelatihan.

Keterbatasan infrastruktur transportasi juga berkontribusi terhadap tantangan ini. Kapal yang beroperasi tidak selalu tersedia setiap hari, dan gelombang laut yang tinggi dapat menghambat perjalanan. Dalam banyak kasus, ASN harus merencanakan perjalanan mereka

jauh-jauh hari untuk memastikan mereka bisa tiba tepat waktu, yang tentunya mengganggu rutinitas dan persiapan kerja mereka.

ASN Madrasah Kepulauan Mentawai juga menyatakan bahwa selain sulitnya akses transportasi, biaya perjalanan yang harus dikeluarkan sangat mahal. Ia dan rekan-rekannya harus menanggung biaya sendiri, yang mencapai sekitar Rp1.000.000 sekali jalan, untuk mengikuti pelatihan di Batam. Beban finansial ini menjadi kendala signifikan bagi banyak guru, terutama di daerah terpencil seperti Kepulauan Mentawai, di mana penghasilan ASN sering kali terbatas.

Jaringan Komunikasi yang Terbatas

Terbatasnya akses jaringan di Kepulauan mentawai juga menjadi tantangan bagi Aparatur Sipil Negara. Sebagain guru di Kepulauan Mentawai mengalami kesulitan dalam mengakses internet, yang berdampak signifikan pada proses belajar mengajar serta administrasi sekolah. Ibuk Irane Maria, Guru SDN 13 Muaro Siberut Mentawai mengatakan bahwa sulitnya akses internet mempersulit Guru mengisi data pada sistem pengelolaan kinerja di Platform Mardeka Belajar. Selain itu, keterbatasan akses ini menghambat kemampuan mereka untuk memanfaatkan sumber daya digital yang penting, seperti materi pembelajaran daring, platform pendidikan, dan alat komunikasi yang efisien. Dalam konteks pendidikan modern, internet memainkan peran krusial dalam memperluas cakupan pembelajaran dan meningkatkan interaksi antara guru dan siswa. Tanpa konektivitas yang memadai, guru-guru terpaksa mengandalkan metode pengajaran tradisional yang sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan siswa yang beragam.

Selain itu, sulitnya akses internet juga mengganggu administrasi sekolah, seperti pengisian data dan pelaporan yang seharusnya dapat dilakukan secara daring. Proses ini menjadi lebih lambat dan memakan waktu, sehingga mengurangi efisiensi manajemen sekolah. Akibatnya, siswa dan guru kehilangan kesempatan untuk belajar dengan cara yang lebih inovatif dan interaktif. Keterbatasan ini menciptakan kesenjangan dalam kualitas pendidikan, membuat siswa di daerah terpencil tertinggal dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di daerah yang memiliki akses internet yang lebih baik.

Untuk mengatasi kendala akses internet di Kepulauan Mentawai, pemerintah setempat telah berupaya meningkatkan infrastruktur telekomunikasi di daerah pelosok. Salah satu langkah penting adalah pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) Bakti, yang bertujuan untuk memperluas jangkauan sinyal dan memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat. Selain itu, penyediaan jaringan Palapa Ring juga menjadi salah satu inisiatif kunci,

yang memungkinkan konektivitas internet serat optik untuk menjangkau daerah terpencil.

Selain upaya peningkatan infrastruktur, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan juga akan memperkenalkan sistem Awan Penggerak, yang dirancang untuk mendukung guru dan tenaga kependidikan di daerah yang mengalami kesulitan dalam mengakses internet. Sistem ini memungkinkan mereka untuk mengunduh materi pembelajaran dan sumber daya pendidikan secara offline, sehingga proses belajar mengajar tetap dapat berlangung meskipun dalam keterbatasan konektivitas. Dengan berbagai upaya ini, diharapkan kualitas pendidikan di Kepulauan Mentawai dapat meningkat dan siswa memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi dan teknologi pendidikan.

Terbatasnya Anggaran pada Peningkatan Kompetensi

Keterbatasan anggaran dalam peningkatan kompetensi ASN menjadi salah satu tantangan dalam penempatan ASN di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Seperti yang diungkapkan olah Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat pada acara koordinasi isu layanan publik di Aula Setda Kabupaten Kepulauan Mentawai, bahwa banyak ASN di Mentawai masih kurang disiplin dalam menjalankan tugas mereka. Contohnya, beberapa ASN sudah mulai meninggalkan tempat kerja pada Jumat siang untuk pergi ke Padang, dan baru kembali pada Senin siang, menyebabkan layanan publik pada hari tersebut tidak berjalan dengan efektif. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan dalam dedikasi dan pengabdian ASN terhadap pelayanan publik di Mentawai, yang seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat. Kondisi ini tentu sangat berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan, karena ASN yang seharusnya memberikan layanan penuh selama lima hari kerja justru hanya memberikan pelayanan secara setengah hari pada hari-hari tertentu

Selain masalah kedisiplinan, tantangan lain yang dihadapi dalam penempatan ASN di Mentawai adalah minimnya kompetensi yang dimiliki oleh ASN. Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat mengatakan bahwa ini besar disebabkan oleh keterbatasan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan. Peningkatan kompetensi merupakan hal yang sangat penting agar ASN dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. Namun, tanpa dukungan anggaran yang memadai, program pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN menjadi sangat terbatas. Akibatnya, ASN yang berada di garis depan pelayanan publik tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat,.

Oleh karena itu, perhatian khusus perlu diberikan oleh pemerintah daerah, terutama OPD di Mentawai, untuk mengatasi keterbatasan anggaran ini dan memastikan bahwa

peningkatan kompetensi ASN menjadi prioritas utama. Dengan alokasi anggaran yang tepat, pelatihan dan pengembangan ASN dapat dilakukan secara berkala dan terarah, sehingga ASN dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Kedisiplinan ASN juga perlu ditingkatkan melalui pengawasan dan penegakan aturan yang lebih ketat, sehingga mereka benar-benar dapat berfungsi sebagai pelayan masyarakat yang profesional dan berdedikasi.

Jauh Terpencil dan Rawan Bencana

Kondisi Geografis yang Rawan Bencana di Kepulauan Mentawai menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penempatan ASN (Aparatur Sipil Negara). Terletak di jalur pertemuan lempeng tektonik, Kepulauan Mentawai dikenal sebagai wilayah yang rawan gempa bumi dan tsunami. Kondisi ini menyebabkan rasa takut dan kekhawatiran yang mendalam bagi ASN yang akan atau sedang ditempatkan di sana. Banyak dari mereka menganggap penempatan di Mentawai sebagai suatu risiko, terutama jika terjadi bencana alam yang dapat mengancam keselamatan mereka sewaktu-waktu. Selain gempa, Mentawai juga sering dilanda badai dan cuaca buruk, yang semakin memperparah ketidakpastian dan rasa tidak aman bagi para ASN.

Pada tahun 2022, tantangan ini semakin terlihat dengan adanya 6 anggota ASN yang memutuskan mengundurkan diri. Salah satu alasan utama adalah lokasi penempatan yang sangat jauh terpencil. Dengan akses transportasi yang terbatas dan infrastruktur yang belum memadai, daerah ini menjadi kurang menarik bagi ASN yang menginginkan lingkungan kerja yang lebih mudah dijangkau dan memiliki fasilitas penunjang yang lengkap. Selain jauh terpencil, kondisi geografis Mentawai yang rawan bencana juga menjadi faktor penentu dalam pengunduran diri para ASN. Wilayah ini rentan terhadap gempa bumi dan tsunami, yang meningkatkan risiko dan tingkat ketidaknyamanan bagi mereka yang ditugaskan di sana. Kekhawatiran akan keselamatan serta kurangnya fasilitas penanggulangan bencana di daerah tersebut menjadi alasan kuat bagi ASN untuk mencari penempatan yang lebih aman.

Dampak kondisi geografis yang rawan bencana ini tidak hanya dirasakan oleh ASN tersebut tetapi juga oleh banyak ASN lain yang enggan ditempatkan di Kepulauan Mentawai. Beberapa ASN yang seharusnya ditugaskan ke daerah ini sering mencari cara agar bisa dipindahkan ke wilayah lain yang dianggap lebih aman. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman bencana alam menjadi faktor penting yang mempengaruhi minat dan kesediaan ASN untuk

bekerja di wilayah tersebut. Padahal, kehadiran ASN di daerah-daerah seperti Mentawai sangat diperlukan untuk menjalankan pelayanan publik**.**

Terbatasnya Srana dan Prasaran

ASN di Sekolah Luar Biasa (SLB) Binga Langai menghadapi tantangan signifikan terkait kekurangan sarana dan prasarana dalam proses pengajaran. Sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk mendukung keberhasilan pendidikan, terutama bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Dalam konteks ini, kekurangan fasilitas seperti ruang kelas yang tidak memadai, alat bantu ajar yang minim, dan infrastruktur yang kurang baik menjadi hambatan besar. Tanpa adanya lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung, siswa akan kesulitan untuk belajar secara efektif.

Salah satu dampak dari kekurangan ini adalah terbatasnya akses siswa terhadap berbagai sumber belajar. Misalnya, jika SLB tidak memiliki buku pelajaran yang cukup, perangkat teknologi seperti komputer, atau alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan siswa, maka proses belajar-mengajar tidak dapat berjalan optimal. Hal ini berpotensi mengurangi minat dan motivasi siswa dalam belajar, karena mereka tidak mendapatkan pengalaman pendidikan yang bermanfaat. Akibatnya, kualitas pengajaran yang diberikan oleh ASN di SLB Binga Langai dapat menurun, dan hasil belajar siswa mungkin tidak memenuhi harapan.

4. KESIMPULAN

Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kepulauan Mentawai menghadapi berbagai tantangan signifikan yang berdampak pada efektivitas pelayanan publik. Akses transportasi yang terbatas dan biaya yang tinggi membuat mobilitas ASN sulit, sementara jaringan komunikasi yang kurang memadai menghambat proses administrasi dan pembelajaran. Selain itu, anggaran yang terbatas untuk peningkatan kompetensi ASN menjadi kendala dalam pengembangan kualitas pelayanan. Kondisi geografis yang rawan bencana juga menciptakan ketidakpastian dan kekhawatiran bagi ASN, menyebabkan mereka enggan untuk ditempatkan di wilayah ini. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan infrastruktur, alokasi anggaran, serta sistem pelatihan yang berkelanjutan, sehingga ASN dapat menjalankan tugas mereka secara efektif dan optimal di daerah terpencil dan rawan bencana seperti Kepulauan Mentawai.

DAFTAR REFERENSI

Badan Pusat Statistik. 2024. Jumlah Pegawai Ngeri Sipil Pemerintah Daerah Sumatera Barat.

Di akses 11 September 2024. https://sumbar.bps.go.id/id/statistics table/2/NTI5IzI=/jumlah-pegawai negeri-sipil-pemerintah-daerah-se- provinsi-sumatera-barat-menurut kabupaten-kota-dan-jenis kelamin.html

DPR RI. 2023. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Di akses 11 september 2023. 69 470/uu-no-20-tahun-2023

Fitrianet Desi, dkk. Penganggaran dan Penerimaan Dana Kapitasi Program JKN di daerah Terpencil Kabupaten Kepualauan Mentawai. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan. 192). 92-101.

Maryni. 2024. Guru Madrasa di Mentawai Menempuh 168 Jam Perjalanan demi ikut Pelatihan. Di akses 11 September 2024. https://erakini.id/daerah/era aI2TB/kisah-guru-madrasah-di mentawai--rela-tempuh-168jam- perjalanan-demi-bisa-ikut pelatihan- kemenag

Rafi Ibah Dita, dkk. 20224. Upaya Peningkatan Motivasi Pegawai: Pemberian Insentif Kepada ASN Daerah 3t (Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar) Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora. 2(6). 82-92.

Rizki Asdal, dkk. 2020. Kapasitas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Penangulangann Bencana Gempa dan Tsunami. Jurnal Manajemen Pemerintahan. 51-72.

Sari Milya, Asmendri. 2020. Penelitian Keperpustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA. Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA. 6(1). 41-53.

Sastrohadiwiryo Siswanto. 2005. Manajeme Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional. Jakarta : Bumi Aksara

Yogopryatno Jatmiko. 2023. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jawa barat : CV. Adanu Abimata.

Zalukhu Mapyanis, dkk 2023. Pengaruh Tugas Pokok da Fungsi Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Spil Pada Sekretarian Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik.8(1). 98 110.